

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sektor pertanian memiliki peran sangat strategis dalam pembangunan nasional diantaranya : sebagai penyerap tenaga kerja, kontribusi terhadap produk domestik bruto, sumber devisa, bahan baku industri, sumber bahan pangan dan gizi serta mendorong bergerakaknya sektor-sektor ekonomi riil lainnya. Pengalaman pembangunan diakhir tahun 1990-an juga menunjukkan bahwa sektor pertanian terbukti mampu menjadi penyangga perekonomian pada kegiatan ekonomi yang tidak berbasis sumber daya (*Resource Based*) ternyata sangat rentan terhadap guncangan dan dinamika lingkungan eksternal. Oleh karena itu diperlukan dukungan dari semua pihak, baik pemerintah, Swasta serta masyarakat untuk mengembangkan sektor ekonomi yang berbasis sumber daya, termasuk sektor pertanian.

Walaupun perannya sangat strategis sektor pertanian masih menghadapi banyak permasalahan diantaranya keterbatasan permodalan petani dan pelaku usaha pertanian lain. Kebutuhan modal diperkirakan akan semakin meningkat dimasa mendatang seiring dengan melonjaknya harga input pertanian baik pupuk, obat-obatan maupun upah tenaga kerja (Ashari, 2009).

Diantara visi Bupati Batu Bara adalah Sejahtera Berjaya yaitu menjadikan masyarakat Kabupaten Batu Bara yang beriman, maju yang berpengalaman, mandiri, dan mapan dalam memenuhi dan meningkatkan kebutuhan hidup dan kualitas kehidupannya termasuk lingkungan hidup didalam kebhinekaan. Hal ini

merupakan usaha nyata untuk lebih mensukseskan program pembangunan yang berwawasan lingkungan dan juga berorientasi pada pembangunan pada bidang pertanian dan perkebunan, sekaligus menciptakan iklim yang lebih kondusif di tengah – tengah masyarakat.

Untuk dapat mengaktualkan pemikiran tersebut dalam berbagai kebijakan, strategi dan program Pemerintah Kabupaten Batu Bara, maka secara teoritis kita perlu memahami berbagai paradigma pembangunan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Sumodiningrat (1996) pada penelitian sebelumnya, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat kita yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah meningkatkan kemampuan dan meningkatkan kemandirian masyarakat. Upaya untuk memberdayakan kecamatan, kelurahan dan desa harus dilakukan melalui 3 (tiga) strategi (Kartasmita, 1995).

**Pertama**, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan.

**Kedua**, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*).

Dalam rangka ini diperlukan langkah – langkah yang lebih positif dan nyata, dalam penyediaan berbagai masukan, serta pembukaan akses yang akan membuat masyarakat menjadi semakin berdaya memanfaatkan peluang. **Ketiga**, dalam proses pemberdayaan harus dilindungi atau dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah.

Paradigma pembangunan pemberdayaan masyarakat timbul karena kesadaran bahwa hasil pembangunan yang telah dapat dicapai mengakibatkan kesejahteraan manusia seringkali dicapai dengan mengorbankan nilai – nilai kemanusiaan. Misalnya untuk pengadaan lokasi industri atau lokasi pembangunan perumahan mewah (*real estate*) maupun pelebaran jalan sering kali dengan menggusurkan masyarakat yang lemah sehingga masyarakat makin tak berdaya.

Proses mencari pertumbuhan ekonomi sering kali dilakukan dengan menidak manusiakan manusia. Paradigma ini berpendapat bahwa proses pembangunan harus mengaktualisasikan nilai – nilai kemanusiaan.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Batu Bara harus mempertimbangkan kepentingan publik, yaitu tekanan pada pemenuhan kebutuhan minimum masyarakat, pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan secara layak oleh pemerintah (Pakpahan, 2003).

Sejalan dengan konsep pembangunan pemberdayaan masyarakat tersebut diatas, terbuka kesempatan untuk mengembangkan penghijauan di Kabupaten Batu Bara melalui pembudidayaan pohon melinjo. Pembudidayaan pohon melinjo diharapkan dapat menambah peningkatan pendapatan masyarakat di kelurahan dan pedesaan serta dapat mengurangi pengangguran akibat krisis ekonomi.

Krisis ekonomi yang terjadi belakangan ini telah mendorong kembali pembicaraan mengenai pembangunan bidang perkebunan dan pertanian. Hasil – hasil dari pertanian dan perkebunan dapat diolah menjadi produk yang selanjutnya

diperdagangkan dengan orientasi ekspor yang akan memberikan sumbangan sumber devisa bagi Negara.

Salah satu dampak buruk akibat krisis ekonomi adalah pemutusan hubungan kerja (PHK), yang menyebabkan ribuan orang yang menjadi pengangguran yang siap mengerjakan apa saja untuk memperoleh uang dalam memenuhi kebutuhannya. Untuk mengurangi pengangguran adanya pemutusan hubungan kerja di perusahaan – perusahaan yang ada di Kabupaten Batu Bara, Pemerintah Kabupaten Batu Bara perlu memikirkan alternatif dalam memberikan bantuan kepada para pengangguran melalui pekerjaan padat karya, misalnya pelaksanaan penghijauan dengan tanaman yang produktif di jalur hijau jalan kelurahan, pedesaan, jalur hijau benteng/bantaran daerah aliran sungai, pekarangan masyarakat, pekarangan kantor pemerintah maupun swasta, dan lahan marginal lainnya.

Pengembangan pembangunan penghijauan di Kabupaten Batu Bara dilaksanakan sejak tahun 2009 yang meliputi pembangunan dan pemeliharaan tanaman, jalur hijau dan pekarangan. Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas memberi penyuluhan pembangunan penghijauan di Kabupaten Batu Bara pada lahan dan pekarangan masyarakat, khususnya tanaman produktif (Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan Kabupaten Batu Bara, 2010).

Batu Bara adalah daerah kabupaten baru di Indonesia yang berdiri atas kemauan masyarakatnya untuk hidup lebih sejahtera dan semangat demokrasi. Dalam rangka perjalanannya maka pemerintah Kabupaten Batu Bara melakukan

langkah-langkah strategis sesuai dengan visi misi Kepala Daerah Kabupaten Batu Bara.

Sesuai dengan amanah UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, bahwa pasal 29 ayat 2 mengisyaratkan bahwa setiap daerah harus menyediakan kawasan ruang terbuka hijau (RTH) sebesar 30 % dari luas daerah. Selain itu juga untuk menunjang kualitas dan estetika lingkungan agar lebih baik perlu di arahkan kawasan yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau untuk membentuk keseimbangan lingkungan antara lahan terbangun dengan lahan tidak terbangun guna mewujudkan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan.

Menurut Soewito (1997), untuk memilih jenis tanaman pohon penghijauan, sebaiknya dipilih jenis tanaman yang bermanfaat ganda dengan memenuhi persyaratan sebagai pohon penghijauan, memberi keindahan, dan menghasilkan (produktif). Mengacu pada persyaratan yang ditentukan, maka pohon melinjo merupakan salah satu alternatif pohon penghijauan yang mungkin sesuai untuk dibudidayakan di Kabupaten Batu Bara. Disamping itu komoditas melinjo mempunyai nilai ekonomis tinggi dan prospek pasar yang baik serta memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan komoditas penghijauan lainnya. Biji melinjo yang dihasilkan dapat diproses menjadi emping melinjo oleh masyarakat kelurahan dan pedesaan melalui wadah kelompok industri kecil rumah tangga (*home industry*) dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat kelurahan dan pedesaan di Kabupaten Batu Bara. Dewasa ini pohon melinjo telah ditanam sebagian masyarakat Kabupaten Batu Bara, namun belum pernah di evaluasi bagaimana manfaatnya bagi masyarakat.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka perlu kiranya dievaluasi terhadap manfaat pohon melinjo serta strategi pengembangannya pohon penghijauan di Kabupaten Batu Bara.

### **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini membahas permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi pengembangan pertanaman pohon melinjo di Kabupaten Batu Bara agar terwujud ruang hijau yang optimal di wilayah Kabupaten Batu Bara, sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang.
2. Apakah pohon melinjo yang dibudidayakan di wilayah Kabupaten Batu Bara selama ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di Kelurahan dan Pedesaan.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Mendapatkan strategi untuk digunakan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam menarik animo masyarakat dan motivasi masyarakat untuk berperan serta atau berpartisipasi aktif dalam membudidayakan tanaman melinjo sebagai penghijauan.
2. Untuk mengetahui manfaat pohon melinjo dalam peningkatan pendapatan masyarakat di kelurahan dan pedesaan.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

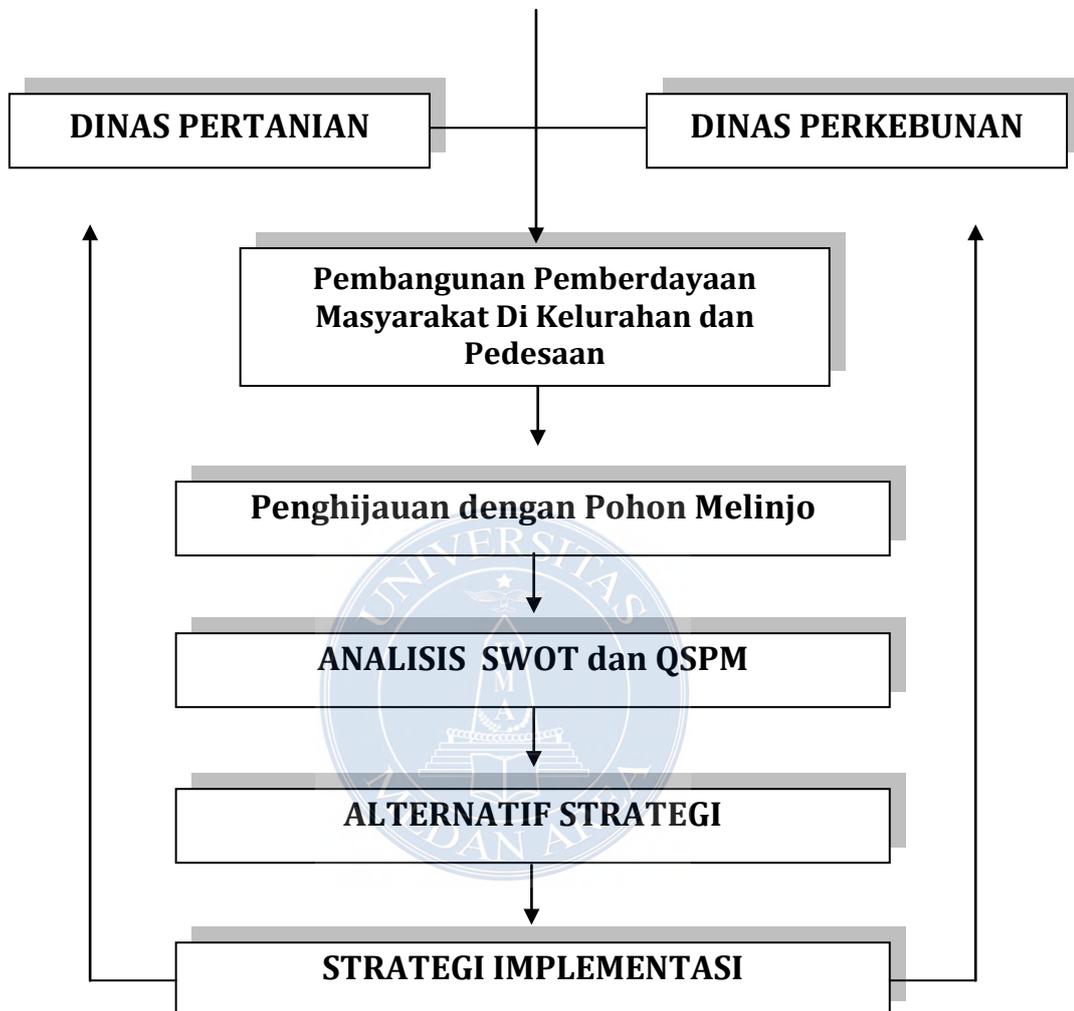
1. Bagi Pemerintah Kabupaten Batu Bara, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan alternatif pengambilan keputusan dalam mengembangkan strategi program tanaman penghijauan wilayah kabupaten melalui pembudidayaan pohon melinjo untuk peningkatan nilai tambah pendapatan masyarakat kelurahan dan pedesaan sekaligus mengurangi pengangguran sebagai wujud nyata program pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan pedesaan di Kabupaten Batu Bara.
2. Sebagai bahan masukan yang akan memberikan wawasan yang lebih luas tentang penghijauan di Kabupaten Batu Bara dalam mewujudkan daerah yang berwawasan lingkungan (*ecopolis*) khususnya dengan tanaman produktif.

#### 1.5. Kerangka Pemikiran

Dalam pengkajian lebih lanjut mengenai evaluasi dan strategi pengembangan tanaman melinjo sebagai penghijauan dan peningkatan pendapatan masyarakat di kelurahan dan pedesaan di Kabupaten Batu Bara, maka diajukan kerangka pemikiran dan konseptual pada Gambar 1 berikut :

Gambar 1. Kerangka Pemikiran dan Konseptual

**KABUPATEN BATU BARA**



### 1.6. Ruang Lingkup Bahasan

Untuk membatasi bahasan agar terfokus secara tepat, maka ruang lingkup penelitian ini hanya membahas berupa :

1. Pembudidayaan pohon/tanaman melinjo yang ditinjau dari manfaatnya sebagai tanaman penghijauan di Kabupaten Batu Bara.

2. Pembudidayaan pohon melinjo yang ditinjau dari manfaat produksi tanaman yang dapat menghasilkan bagi masyarakat di Kabupaten Batu Bara.

